

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *APBN 2018*. Diakses di <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2018/> tanggal 13 Maret pukul 09:30 WIB
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. *APBN 2019*. Diakses di <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> tanggal 13 Maret pukul 09:35 WIB
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. *APBN KITA KINERJA DAN FAKTA; edisi Februari 2019*. Diunduh di <https://kemenkeu.go.id/media/11870/apbn-kita-februari-2019.pdf> tanggal 13 Maret pukul 09:36
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Baramg Mewah*
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.
- Soemarso, S.R. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.